PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj.IP)

## BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

MELONGUANE – JANUARI 2023

# KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera, Puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud menyajikan capaian kinerja program dan kegiatan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati yang sudah dibuat dalam dokumen Renstra Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025.

Dalam penyusunan LKj.IP Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu, semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif diperlukan untuk menyempurnaan laporan ini. Demikian Laporan ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan Program dan Kegiatan kedepan dapat lebih baik.

Melonguane, Januari 2023

Kepala Bapelitbang Kab. Kepl Talaud,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD BAPELITBANG

**SPENT. BAWANGUN, ST., MT**
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP.19730707 200003 1 005

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dikategorikan berdasarkan hasil evaluasi, Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh nilai sebesar 94,65% dengan kategori (sangat memuaskan) mencapai sasaran Indikator Straegis untuk tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2025. LKj.IP tidak hanya sekedar alat tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 dengan target kinerja yang akan dicapai.

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala-kendala antara lain menyangkut aspek koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, sinergitas program/kegiatan antar sektor, manajemen keuangan, aspek kelembagaan, serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan. Terhadap kendala-kendala permasalahan yang dihadapi diupayakan dilakukan perbaikan ke depan untuk pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... ii

DAFTAR ISI ..... iii

DAFTAR TABEL ..... v

DAFTAR GAMBAR ..... vi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1
B. Tugas dan Fungsi ..... 2
C. Struktur Organisasi ..... 2
D. Sumber Daya Manusia (SDM) ..... 4
E. Isu Strategis dan Permasalahan ..... 6
   1. Isu Trategis ..... 6
   2. Permasalahan Utama ..... 7
F. Lingkungan Strategis ..... 8
G. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP ..... 9
   1. Dasar Hukum ..... 9
   2. Tujuan LKjIP ..... 9
   3. Manfaat ..... 10
H. Sistematika LKj.IP ..... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 14

A. Rencana Strategis ..... 14
   1. Tujuan dan Sasaran ..... 15
   2. Perubahan Renstra (pada Tahun 2022) ..... 17
B. Perjanjian Kinerja ..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 19

A. Capaian Kinerja Organisasi ..... 21
   1. Membandingan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 ..... 22
   2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir ..... 24
   3. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ..... 25

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional ..... 27
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ..... 27
6. Analisa atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 46
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ..... 44

B. Realisasi Anggaran ..... 48
1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 ..... 48
2. Efisiensi Penggarana ..... 50

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya ..... 59

BAB IV PENUTUP ..... 61

A. Kesimpulan ..... 61
B. Saran ..... 62

LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Bapelitbang Kab. Kepl. Talaud ..... 5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bapelitbang Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 ..... 16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bapelitbang Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 ..... 19
Tabel 3.1 Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2022 ..... 21
Tabel 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir ..... 24
Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ..... 26
Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanan Strategis Organisasi ..... 26
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ..... 39
Tabel 3.6 Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah ..... 43
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi antara Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 ..... 45
Tabel 3.8 Realisasi Program dan Kegiatan Bapelitbang Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 ..... 46

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud..... 4

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah kebutuhan pembangunan bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan. Pertanggung-jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penilaian akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara umum LKj.IP ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Untuk itu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara detail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud pada masa mendatang.

**B. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 13 Desember Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Kabupaten;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kabupaten;
4. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kabupaten;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup kabupaten;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

**C. Struktur Organisasi**

Struktur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang yakni :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan;
   3) Sub Bagian Program.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
   1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
   2) Sub Bidang Data dan Pelaporan;
   3) Sub Bidang Pengedalian dan Evaluasi.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
   1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
   2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
   3) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayaan, terdiri dari :
   1) Sub Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayaan I;
   2) Sub Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayaan II;
   3) Sub Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayaan III.
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
   1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
   2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
   3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022**

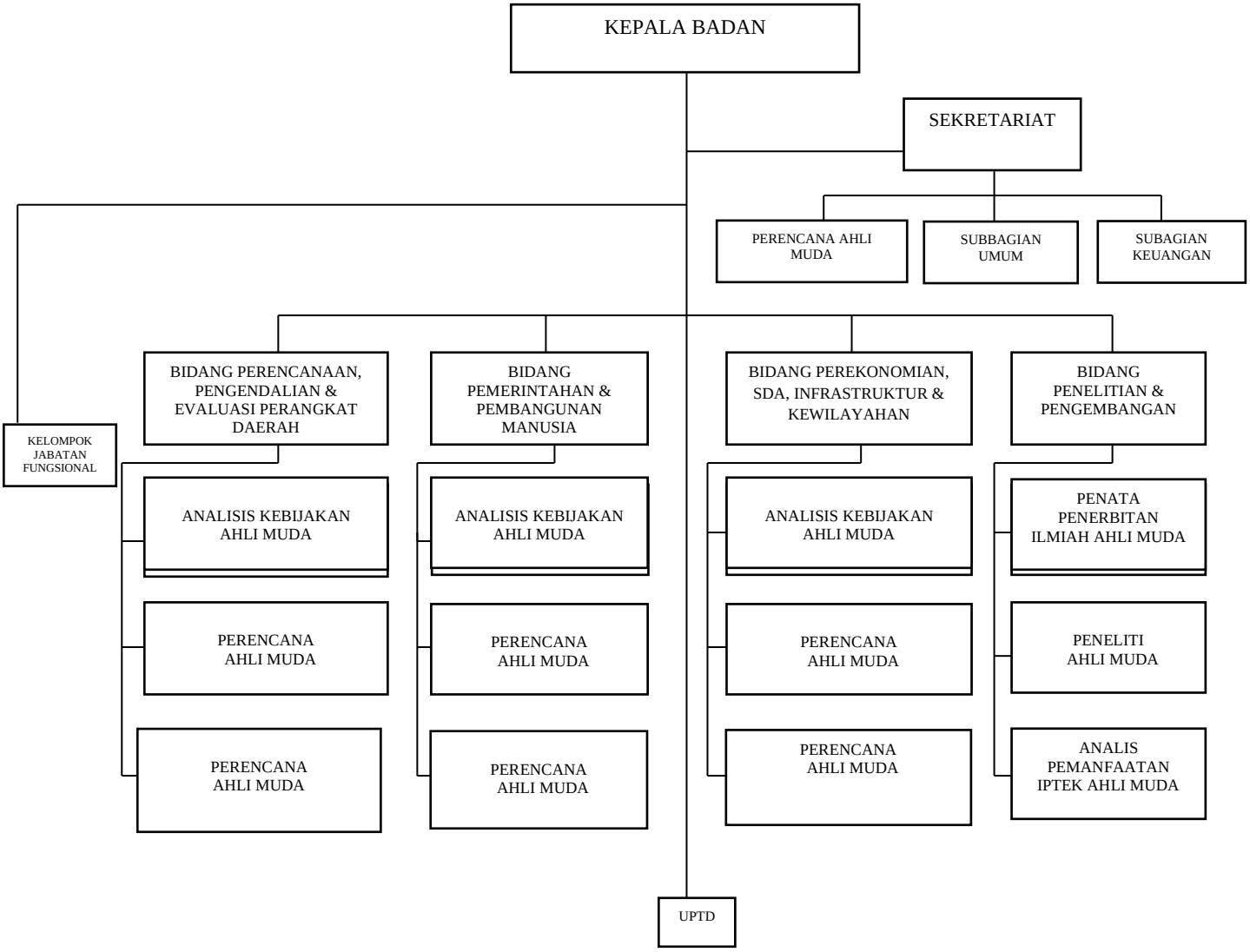


## D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari struktur di atas dapat dilihat bahwa dari 21 jabatan yang terisi 20 jabatan. Jumlah Pegawai Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 sebanyak 31 orang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Pegawai yang memiliki jabatan 20 orang dan pelaksana 11 orang. Rincian kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1.1

## Daftar Nama Pegawai
## Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
## Kabupaten Kepulauan Talaud

| NO | NAMA/NIP | KEPANGKATAN | JABATAN | PENDIDIKAN |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Spen T. Bawangun, ST., MT<br>19730707 200003 1 005 | Pembina Utama Muda IV/C | Kepala Bapelitbang | Pasca Sarjana |
| 2 | Jonier Mona, SE.Ak., MM<br>19710615 200604 1 024 | Pembina TKT I IV/B | Sekretaris Bapelitbang | Pasca Sarjana |
| 3 | Yeri Losoh, S.IP<br>19761110 200312 1 009 | Pembina TKT I IV/B | Kabid Penelitian & Pengembangan | Sarjana |
| 4 | Martha R. Alotia SE.Par., M.Si<br>19781206 200903 2 0002 | Pembina IV/A | Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pasca Sarjana |
| 5 | Harold T. Tulus, SS., M.Si<br>19760617 201001 1 010 | Penata TKT I III/D | Kabid. Perencanaan Pengenalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Pasca Sarjana |
| 6 | Reagen Ade Putra, SH<br>19860111 201001 1 005 | Penata TKT I III/D | Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayaan | Sarjana |
| 7 | Silva Tangdialla S.Si., M.Si<br>19800308 200501 2 014 | Pembina IV/A | Perencana Ahli Muda | Pasca Sarjana |
| 8 | Indah R. E. Deri, S.Si., M.Sc<br>19821209 201001 2 011 | Pembina/IVA | Perencana Ahli Muda | Pasca Sarjana |
| 9 | Hermanto S. Halean, S. Pi<br>19720318 200601 1 006 | Penata Tk. I / III D | Kasubid Inovasi dan Teknologi | Sarjana |
| 10 | Rolan Tawaris, SH<br>19780215 200604 1 017 | Penata Tk. I / III D | Kasubid Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayaan I | Sarjana |
| 11 | Adri Ratunsee, SE<br>19710930 200604 1 009 | Penata / III C | Kasubid Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayaan III | Sarjana |
| 12 | Ansye E. Larenggam, SE<br>19760211 200701 2 009 | Penata Tk. I / III D | Kasubid Ekonomi dan Pembangunan | Sarjana |
| 13 | Honi Riung, S.IP<br>1980092901001 1 010 | Penata / III C | Kasubid Sosial dan Pemerintahan | Sarjana |
| 14 | Romansa Joroh, M. MT<br>19800305 201102 1 002 | Penata Tk. I / III D | Kasubid Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayaan II | Pasca Sarjana |
| 15 | Stanley E. Pantas, SE<br>19790614 200501 1 013 | Penata Tk. I / III D | Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II | Sarjana |
| 16 | Madlifan Aguw, SST.Par | Penata Muda Tkt. I / IIIB | Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I | Sarjana |
| 17 | Miko H. Tucunan, S.IP<br>19810529 200501 1 006 | Penata Muda Tkt. I / IIIB | Kasubid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III | Sarjana |
| 18 | Alwina Entiman, SAP<br>19820222 2012 12 2 001 | Penata Muda Tkt. I / IIIB | Kasubag Umum | Sarjana |
| 19 | Elizbeth F. M. Winowoda, S.SI<br>19890225 201503 2 003 | Penata Muda Tkt. I / IIIB | Kasubag Keuangan | Sarjana |
| 20 | Adryon Nabuasa, S. STP<br>19940419 201609 1 002 | Penata Muda Tkt. I / IIIB | Kasubid Pengendalian dan Evaluasi | Sarjana |
| 21 | Frans M. Takasanaeng, S. Kom<br>19940326 201903 1 014 | Penata Muda/ IIIA | Staf | Sarjana |
| 22 | Laura Sojouw, ST<br>19871027 201903 2 008 | Penata Muda/ IIIA | Staf | Sarjana |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Livia Walesasi, SE<br>19911131 201903 2 025 | Penata Muda/ IIIA | Staf | Sarjana |
| 24 | Abdisan Besinung, S.ST<br>19900411 202012 1 014 | Penata Muda<br>III/A | Staf | Sarjana |
| 25 | Yoedy Majore, S.Kom<br>19950214 202012 1 001 | Penata Muda<br>III/A | Staf | Sarjana |
| 26 | Gloria P. Rantung, SE<br>19950508 202012 2 008 | Penata Muda<br>III/A | Staf | Sarjana |
| 27 | Yen Yumelia Mararu<br>19750614 200701 2 017 | Pengatur Tkt.I/IID | Staf | SMA |
| 28 | Anita Sasil<br>19780218 200801 2 018 | Pengatur Tkt.I/IID | Staf | SMA |
| 29 | Arter P. Mangamis<br>19850708201001 1 001 | Pengatur/IIC | Staf | SMA |
| 30 | Astrini L. Lindo<br>19740530 201402 2 002 | Pengatur Muda<br>Tkt.I/IIB | Staf | SMA |
| 31 | Nelmi Kalumpiu, Amd.AK<br>19871108 202012 2 009 | Pengatur<br>II/C | Staf | Diploma |

## E. Isu Strategis dan Permasalahan

### 1. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud, Bapelitbang dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) yang didukung oleh ketersediaan *database* pembangunan serta sistem informasi yang akurat dan memadai.
2. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah untuk meningkatan sinergitas antara perencanaan dari level Kabupaten, Kecamatan sampai pada Desa/Kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pihak swasta dan pihak lainnya dalam proses perencanaan.
3. Peningkatan fasilitasi dan Pemanfaatan kebijakan inovasi daerah.
4. Optimalisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan antara lain melalui peningkatan ketersediaan data kelitbangan.
5. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan bidang teknis seperti Rencana Aksi Daerah untuk masing-masing bidang.

6. Peningkatan kinerja kapasitas kelembagaan Bapelitbang beserta aparaturnya.
7. Optimalisasi pelayanan Bapelitbang dalam melaksanakan fungsi koordinasi kepada Perangkat Daerah.

**2. Permasalahan Utama**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bapelitbang Kabupaten Keplulauan Talaud dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan *Database* Pembangunan Masih Kurang

Ketersediaan *database* pembangunan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Dari *database* inilah, perencana mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dengan menetapkan indikator kinerja pembangunan secara akurat dengan target kinerja yang terukur. Hal ini masih menjadi permasalahan karena seluruh Perangkat Daerah belum mempunyai basis data yang baik sehingga pengelolaan data bersifat insidentil yang hasilnya sangat subjektif dan belum akurat;

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Belum Optimal

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan menghasilkan laporan kegiatan yang hanya berisi rencana dan realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut beserta permasalahannya. Laporan ini belum dapat menyajikan outcome (hasil) dari kegiatan/program tersebut dan bagaimana konstribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Diharapkan ke depannya, Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud mampu merumuskan pola pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan hasil laporan kinerja yang bermanfaat untuk langkah-langkah stratgis dalam pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan.

c. Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Perencana Masih Rendah

Secara umum, kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah sangat kurang hal ini disebabkan tidak adanya tenaga fungsional perencana di tiap Perangkat Daerah sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan oleh aparatur yang kebetulan ditugaskan di bagian perencanaan Perangkat Daerah yang hanya belajar secara otodidak melalui literatur-literatur perencanaan dan kursus-kursus singkat. Diharapkan, Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud mampu berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah melalui kerjasama dengan institusi lain yang berkompeten dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dan diklat fungsional perencana;

d. Koordinasi Antar Perangkat Daerah Belum Optimal

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan juga ditentukan oleh seberapa intensnya koordinasi antar Perangkat Daerah dilakukan khususnya bagi program pembangunan lintas sektoral. Namun kenyataannya, dalam implementasi program di lapangan, Perangkat Daerah saling mengklaim sebagai pemilik program sehingga implementasi pembangunan yang seharusnya bersifat komprehensif, multi sektoral berubah menjadi parsial yang mengakibatkan sasaran pembangunan tidak tercapai. Diharapkan, ke depannya Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud mampu menjadi koordinator yang handal dalam memfasilitasi dan memediasi seluruh Perangkat Daerah agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

## F. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi suatu organisasi. Lingkungan strategis meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan strategis tersebut untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada Bapelitbang Kabupaten Kepulan Talaud, instansi atau organisasi pelaksana pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Talaud. Analisis lingkungan eksternal adalah luasnya wilayah Kabupaten Talaud sebagai salah

satu tantangan tersendiri Terkait sarana dan prasarana dan jangkauan internet yang masih terbatas. Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022 melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas pendukung antara lain Gedung kantor, komputer untuk menunjang kelancaran tugas-tugas yang ada di Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud.

## G. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat

### 1. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulan Talaud Tahun 2022;
c. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi;
d. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

### 2. Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP)

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj.IP adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kabupaten Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintah serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) kepada pihak-pihak yang memberi mandat kewenangan.

Adapun tujuan penyampaian LKj.IP adalah sebagai:

a. Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
b. Perbaikan perencanaan kegiatan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek;
c. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

**3. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP)**

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Talaud Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

a. Mendorong Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
b. Menjadikan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan lingkungannya;
c. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan pada khususnya dan kepada Pemerintah Daerah pada umumnya.

## H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP)

Penulisan LKj.IP Bapelitbang Kabupaten Talaud Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Latar Belakang
- Tugas dan Fungsi Bapelitbang Kab. Kepl. Talaud
- Struktur Organisasi
- SDM
- Isu Strategis dan Permasalahan
- Dasar Hukum, Tujuan, Manfaat
- Sistematika LKj.IP

**BAB II Perencanaan Kinerja.**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

a. Renstra

- Uraian Terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada pada Renstra Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Di jelakskan juga apabila pada tahun tersebut terdapat Revisi/ Perubahan Renstra.

b. Perjanjian Kinerja

- Isi dari perjanjian Kinerja;
- Dijelaksan juga apabila terdapat revisi atau perubahan Perjanjian Kinerja.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan didepan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/ kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk:

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional;
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja;
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi penetapan tujuan, serta penentuan strategi cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan) yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu alat manajemen, yang merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal maupun nasional. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan/kendala yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut merupakan dasar untuk terwujudnya tujuan dan sasaran serta strategi instansi pemerintah.

Dengan kata lain, Rencana Strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan atau

kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan masukan bagi RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah disusun dan ditetapkan dengan menambahkan indikator kinerja untuk masing-masing sasarannya. Unsur-unsur utama yang secara formal telah didefinisikan dalam Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah pernyataan tujuan dan sasaran serta perumusan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana Strategis sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran singkat mengenai tujuan, sasaran dan Indikator serta Rencana Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 sebanyak 2 sasaran strategis.

Tujuan pembangunan dalam Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 merupakan penjabaran dan implementasi dari Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk mencapai visi dan misi tersebut harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, yaitu menetapkan tujuan strategis yang merupakan hasil kerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses penetapan perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur serta merupakan tantangan kedepan, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode waktu tertentu.

Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sasaran yang sudah dimuat dalam dokumen Restra Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 dan Tahun 2020 merupakan Indikator sasaran Renstra Kondisi Awal.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bapelitbang Tahun 2022 berdasarkan Renja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**
**Tujuan dan Sasaran Bapelitbang Tahun 2022**

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai Target Kinerjanya dengan Baik | 68,50% | 75%-80% | 80%-85% | 85%-90% | 90% - 95% | 95%-99% |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | 69,50% | 75%-80% | 80% - 85% | 85%-90% | 90% - 95% | 95%-99% |
| | | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Persentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan | 60% | 60%-65% | 65%-70% | 70%-75% | 75%-80% | 80%-85% |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Daerah | 50% | 50%-55% | 55%-60% | 60%-65% | 65%-70% | 70%-75% |

## 2. Perubahan Renstra (Pada Tahun 2022)

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih pada tanggal 26 Februari 2020 maka Kepala Daerah harus melaksanakan Visi dan Misinya yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian dengan Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah dilantik. Bapelitbang juga telah menyesuaikan Tujuan dan Sasarannya berdasarkan Visi dan Misi tersebut yang dituangkan kedalam Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022.

Tujuan yang ditetapkan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud sebelum Perubahan Renstra tahun 2020 ada 3 terdiri dari:

1. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan berbasis kinerja;
2. Mewujudkan transparansi pemerintahan yang efektif;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

Sedangkan Sasaran kegiatan perencanaan pembangunan daerah Tahun sebelum Perubahan Renstra tahun 2020 ada 9 terdiri dari:

1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah;
2. Terwujudnya keselarasan program dan kegiatan dalam semua dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan;
4. Terwujudnya keselarasan rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
5. Meningkatnya hasil konsultasi dan koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Meningkatnya pelaporan dan evaluasi kinerja dan keuangan;
7. Meningkatnya kapasitas aparatur perencana;
8. Terwujudnya ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi serta data-data yang menunjang perencanaan pembangunan;
9. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## B. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV. Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan Kepala Bidang oleh Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome)* yang seharusnya terwujud akibat tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang mencapai Target Kinerjanya dengan Baik | 80%-85% |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | 80%-85% |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Peresentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan Dalam Pelaksanaan Pembangunan | 65%- 70% |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah | 2 |
| | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | 55%-60% |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja ada 6 aspek dari 7 aspek yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

| **Skala Nilai** | **Kategori Penilaian** |
|---|---|
| >90 – 100 | Sangat Memuaskan |
| >80 – 90 | Memuaskan |
| >70 – 80 | Sangat Baik |
| >60 – 70 | Baik |
| >50 – 60 | Cukup |
| >30 – 50 | Kurang |
| 0 – 30 | Sangat Kurang |

*Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015*

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2025 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil diperoleh dari laporan program dan kegiatan yang ada pada setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud**.**

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkunan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Berdasarkan pada matriks pengukuran pencapaian sasaran, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**1. Membandingkan antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian kinerja dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**
**Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=(5/4)x100%* |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai Target Kinerja Dengan Baik | 80%-85% | 84% | 98,82 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | 80% - 85% | 84,5% | 99,41 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Peresentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan | 65% - 70% | 0% | - |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | 2 | 4 | 200,00 |
| | | Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah | 55% - 60% | 45% | 75 |

*Sumber: Matriks Renstra Perubahan Bapelitbang 2020-2025 Tahun ke- 2*

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran Kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

Berdasarkan atas Tabel 3.1 diatas, dapat dilihat capaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022 setelah melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi, program, kegiatan serta seluruh sub kegiatan yang dipercayakan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Untuk indikator sasaran pertama yaitu persentase perangkat daerah yang mencapai target kinerja dengan baik, dimana pada tahun 2022 realisasinya mencapai 98,82%. Hal ini didukung oleh sebagian besar perangkat daerah telah berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 31 (tiga puluh satu) perangkat daerah yang ada di

Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tahun 2022 masih terdapat 6 (enam) perangkat daerah yang belum dapat mencapai target yang telah dibuat berdasarkan atas indikator sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra dan Renja perangkat daerah.

Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud berupaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Perubahan Renja Bapelitbang Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih dan telah dilantik tanggal 26 Februari 2020. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapelitbang Kepulauan Talaud Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Realisasi pada akhir tahun 2022 menunjukan bahwa 5 (lima) Indikator kinerja utama Bapelitbang sesuai yang ditargetkan, dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat mencapai target yang di recanakan di tahun kedua. Diharapkan kinerja sasaran yang sudah ditargetkan sampai tahun terakhir dapat tercapai.

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 3.2**
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Tahun 2020 | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kondisi Awal | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai Target Kinerja Dengan Baik | 68,50% | 75% - 80% | 80% | 100,00 | 80% - 85% | 84% | 98,82% |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | 69,50% | 75% - 80% | 80% | 100,00 | 80% - 85% | 84,5% | 99,41% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Peresentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan | 60% | 60% - 65% | 0% | - | 65% - 70% | 0 | - |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 2 | 4 | 200,00% |
| | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | 50% | 50% - 55% | 50% | 100,00 | 55% - 60% | 45% | 75% |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 (tahun kedua), mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021). Dimana capaian realisasi indikator kinerja sebesar 83,75% Tahun 2021, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan capaian indikator kinerja sebesar 94,65% dengan kategori *"*Sangat Memuaskan*"*. Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud dapat membandingkan pencapaian target Tahun 2022 dengan tahun terakhir karena Tahun 2021 kondisi tahun pertama sedangkan beberapa tahun sebelumnya ada perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga berpengaruh terhadap indikator yang berbeda.

## 3. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) pada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diketahui Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing indikator kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud. Realisasi kinerja masing-masing sasaran strategis Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kondisi Awal | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai Target Kinerja dengan Baik | 68,50% | 75%-80% | 80% | 80%-85% | 84% |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | 69,50% | 75%-80% | 85% | 80%-85% | 84,5% |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Peresentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan | 60% | 60% - 65% | 0% | 65%-70% | 0% |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | 50% | 50% - 55% | 50% | 55-60% | 45% |

**Tabel 3.4**
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Tedapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Tahun 2021 | Tahun 2022 | | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kondisi Awal | Target | Realisasi | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase perangkat Daerah yang Mencapai Target Kinerja dengan Baik | 80% | 80%-85% | 85% | 95% - 99% |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | 85% | 80%-85% | 84,5% | 95% - 99% |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Peresentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan | 0% | 65%-70% | 0% | 80% - 85% |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | 50% | 55-60% | 45% | 70% - 75% |

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki Indikator Kinerja Standar Nasional sebagaimana diatur dalam peratuan perundang-undangan.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan;**

Capaian realisasi kinerja yang menunjang Indikator Kinerja Perangkat Daerah antara lain untuk merealisasikan Sasaran Strategi Perangkat Daerah ditunjang oleh Sasaran Strategis Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Menjawab Isu Strategis Daerah

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Menjawab Isu Strategis Daerah | 1 Persentase Keterkaitan dan Keselarasan antara Dokumen RPJMD dan RKPD | Persen | 100% | 100% | 12 Bulan | 100% |
| | 2 Persentase Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Nasional | Persen | 100% | 100% | 12 Bulan | 100% |
| | 3 Persentase Konsisten antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah | Persen | 100% | 100% | 12 Bulan | 100% |
| | 4 Persentase Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Dengan Pagu Anggaran | Persen | 90% | 85% | 12 Bulan | 94% |
| | 5 Persentase Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran | Persen | 80% | 80% | 12 Bulan | 100% |
| | 6 Persentase Ketersediaan Database Pembangunan dari Semua Bidang | Persen | 95% | 86% | 12 Bulan | 91% |
| | 7 Persentase Keterkaitan antara Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun Sebelumnya Dengan Isu Strategis Tahun Perencanaan | Persen | 70% | 65% | 12 Bulan | 92,86% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Seluruh Elemen dan *Stakeholder* dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Hasil Koordinasi yang dimanfaatkan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan | Persen | 95% | 95% | 12 Bulan | 100% |
| Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Seluruh Elemen dan Stakeholder dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Persentase Persentase Pokok-Pokok Pikran DPRD Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan | Persen | 55% | 50% | 12 Bulan | 90,91% |
| | Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 70% | 65% | 12 Bulan | 92,8% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam Penyusunan Database Pembangunan.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam Penyusunan Database Pembangunan | Persentase Perangkat Daerah Teknis yang Memiilki Database Lengkap | Persen | 60% | 58% | 12 Bulan | 97% |
| | Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang Memiliki Database yang Lengkap | Persen | 90% | 80% | 12 Bulan | 89% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Monitoring atas Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persen | 85% | 80% | 12 Bulan | 94,1% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaannya | Persen | 100% | 100% | 12 Bulan | 100% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Semua Bidang.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Semua Bidang | Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD | Persen | 100% | 75% | 12 Bulan | 75% |
| | Persentase Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Persen | 80%-85% | 80% | 12 Bulan | 94% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah I.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah I | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik adalah sebesar 94%, dimana sebanyak 29 dari 31 dokumen Renja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam pengukuran kualitas Renja Perangkat Daerah sehingga capaian target indikator adalah sebesar 94%. Hal ini antara lain karena ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang tidak proakif untuk asistensi renja dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai. Dari 31 Organisasi Perangkat Daerah yang dokumen Renja berkualitas baik atau standar sudah terpenuhi berdasarkan peraturan tetapi bobot kualitasnya Renja belum bisa ditentukan berapa persen kualitasnya karena belum di evaluasi secara berkala, karena belum tersedia Anggaran dan tidak ada peralatan kerja bagi personil Bapelitbang untuk pengadaan Laptop, Printer Kamera, GPS, Drone, LCD Full Zet, untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Masih ada Kecamatan yang tidak proaktif melakukan asistensi hal ini disebabkan karena Aparatur Sipil Negara yang menangani penyusunan dokumen Renja Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, dan tidak proakif untuk asistensi renja, juga Bapelitbang tidak proaktif mengunjugi OPD yang bersangkutan karena tidak teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah II.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah II | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah III.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah III | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Semua Bidang.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah disemua Bidang | Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD | Persen | 100% | 75% | 12 Bulan | 75% |
| | Persentase Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | Persen | 80%-85% | 82,50% | 12 Bulan | 97% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilalayahan.

- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 82,50% | 12 Bulan | 97% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | Persen | 80%-85% | 82,50% | 12 Bulan | 97% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 82,50% | 12 Bulan | 97% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | Persen | 80%-85% | 82,50% | 12 Bulan | 97% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 75% | 12 Bulan | 94% |
| | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | Persen | 80%-85% | 82,50% | 12 Bulan | 97% |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | Persen | 80%-85% | 82,50% | 12 Bulan | 97% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah | Presentase Peningkatan Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Melibatkan Perangkat Daerah, Lembaga Penelitian, Pihak Swasta Dan Elemen Masyarakat | Persen | 50% | 0 | 12 Bulan | 0% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah. Indikator Kinerja tersebut tidak ada capaian kinerjanya karena tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.

- Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terbangunnya Budaya Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah Dengan Kualitas Inovasi Terkait Isu Strategis Pemerintah | Persen | 55%-60% | 55% | 12 Bulan | 91% |
| | Peningkatan Jumlah Usulan Inovasi Dari Perangkat Daerah | Persen | 80% | 30% | 12 Bulan | 38% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Meningkatkan Minat Seluruh Perangkat Daerah Dalam Menciptakan Inovasi Yang Mampu Menjawab Isu Strategis Urusannya.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Minat Seluruh Perangkat Daerah Dalam Menciptakan Inovasi Yang Mampu Menjawab Isu Strategis Urusannya | Persentase Perangkat Paritisipasi Perangkat Daerah Dalam Membuat Inovasi Daerah | Persen | 9%-10% | 9% | 12 Bulan | 10% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

- Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang Terlibat dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan | Persen | 6% | 0% | 12 Bulan | 0% |
| | Jumlah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (akademisi), Pihak Swasta dan Elemen Masyarakat yang Bekerjasama dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan | Jumlah | 2 | 0% | 12 Bulan | 0% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah. Kedua Indikator Kinerja tersebut tidak ada capaian kinerjanya karena tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.

- Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan Dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Persentase Perangkat Daerah yang Terlibat dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Persen | 6% | 0% | 12 Bulan | 0% |
| | Jumlah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (akademisi), Pihak Swasta dan Elemen Masyarakat yang bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah | 2 | 0% | 12 Bulan | 0% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah. Kedua Indikator Kinerja tersebut tidak ada capaian kinerjanya karena tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.

***Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah***

Merupakan sasaran penting dengan indikator kinerja sasaran persentase perangkat daerah yang mencapai target kinerja dengan baik. Dengan cara membandingkan capaian target perencanaan kinerja perangkat daerah tahun 2022 sebesar 94,35 % menunjukan tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan, kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Koordinasi dan kolaborasi antar perencanaan sektor, ada sinkronisasi perencanaan yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu Perubahan Renstra Tahun 2020-2025 dan Perubahan Renja Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025, maka dapat dilihat bahwa Bapelitbang

kabupaten Kepulauan Talaud pada indikator pertama ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun 5 (lima) perangkat daerah yang masih mengalami kendala dalam upaya pencapaian target berdasarkan atas dokumen perencanaannya masing-masing terdiri atas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun penyebab tidak tercapainya kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah tersebut. Beberapa hal yang dapat disebutkan sehubungan dengan hal tersebut adalah Pertama, indikator kinerja pada Dinas PUTR yang berhubungan dengan indeks infrastruktur (air minum/air bersih, sanitasi yang layak, dan infrastruktur mitigasi bencana). Kedua, indikator kinerja yang berhubungan dengan rumah layak huni pada Dinas Perkim. Ketiga, indikator kinerja pada dinas perikanan yang berhubungan dengan peningkatan produksi perikanan budidaya dan pengelolaan hasil perikanan menjadi barang bernilai ekonomi tinggi. Ketiga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang memiliki indikator kinerja persentase desa yang memiliki layanan perpustakaan mandiri, persentase pertumbuhan jumlah pengunjung ke e-library, dan jumlah pemustaka. Kelima, Dinas Lingkungan Hidup dengan indikatornya yang berhubungan dengan persampahan. Dan lima, Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat merealisasikan kinerja yang berhubungan dengan rasio penegakan perda dan indikator yang berhubungan dengan kebakaran.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerjanya dengan baik yang mencapai target yang melalui program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Persentase Perangkat Daerah yang capaian SAKIP sebesar 84,5 % pada komponen perencanaan kinerja minimal baik. Indikator yang mencapai target yang melalui program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Strategis Bapelitbang 2020-2025.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Bapelitbang termasuk penyebab keberhasilan ataupun kegagalan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu:

a). Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerjanya dengan baik. Capaian indikator persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80%-100% dimana Dokumen Renja berkualitas baik diukur berdasarkan:

1. Ketepatan Waktu, memilki skor 10
2. Keselarasan terhadap Renstra, memiliki skor 25
3. Prioritas Pembangunan yang diakomodasi, memiliki skor 40
4. Kesesuaian penyajian substansi dengan pedoman, memiliki skor 25
5. Nilai Kategori Baik adalah = atau > 80.

Berdasarkan hasil capaian Renja Perangkat Daerah berkualitas baik Tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel kinerja Perangkat Daerah.

**Tabel 3.5**
**Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022**

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasaran OPD Meningkatkan Kualitas | Persentse Perangkat Daerah yang Mencapai Target Kinerja dengan Baik | Persen | 80% - 85% | 80,65% | 12 Bulan | 94,88% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. | Persentase Perangkat Daerah yang capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | Persen | 80% - 85% | 75% | 12 Bulan | 88,24% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerjanya dengan baik atau memenuhi standar penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi bobot kualitas perencanaanya belum semua bisa ditentukan berapa persen kualitasnya karena belum di evaluasi secara berkala. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya dengan mendatangi langsung Perangkat Daerah untuk mengumpulkan laporan realisasi kinerja Perangkat Daerah namun masih juga mengalami kendala karena operator yang menangani perencanaan tidak berada di tempat.

- Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah.

  Sasaran Strategi tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Waktu | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Persentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan | Persen | 65%-70% | 0% | 12 Bulan | 0% |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | OPD | 2 OPD | 4 | 12 Bulan | 200% |
| | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah | Persen | 55%-60 % | 45% | 12 Bulan | 75,00% |

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan merealisasikan Program Penelitian dan Pengembangan Wilayah.

Indikator Hasil penelitian yang direkomendasikan dalam pelaksanaan pembangunan tidak tercapai karena tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.

**Permasalahan Terkait Pelaksanaan Kegiatan**

- Beberapa data dari Bidang-bidang yang belum tersedia, dan terupdate sampai tahun 2022 misalnya dari Bidang Pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan sampai tahun 2022, Jumlah penduduk miskin perkecamatan/desa belum tersedia sampai tahun 2022 yg statusnya sudah tervalidasi dan terverifikasi, kerena saat ini masih menggunakan data BPS.
- Renja Kecamatan masih perlu perbaikan dan perlu sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan.
- Terkait dengan Persentase Hasil penelitian yang direkomendasikan dalam pelaksanaan pembangunan tidak terealisaikan kerena tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja.

**Upaya Mengatasi Masalah**

- Mengoptimalisasi kegiataan-kegiatan pendataan sektoral Bidang terupdated, tervalidasi dan bekelanjutan di Pemerintah Daerah Kab Kepl. Talaud;
- Percepatan penetapan Perubahan RPJMD;
- Mendampingi Penyusunan Renja Kecamatan lebih intensif dan menyediakan SDM serta Anggaran yang memadai di Kecamatan.

***Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah***

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis ini terdapat 3 indikator yang digunakan sebagai alat pengukuran, yaitu:

1) Persentase Hasil Penelitian yang dijadikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan.

   Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian agar dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan, Bapelitbang melakukan fasilitasi dalam penyusunan Kajian Penelitian dengan melakukan kerja sama dengan Tim Akademisi dari Perguruan Tinggi melalui penyusunan Kajian Kawasan Ekonomi Perbatasan (KEP) Mane'e (Miangas, Nanusa dan Gemeh). Kajian ini

bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi daerah dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan daerah dalam kesatuan dengan ekonomi nasional. Wilayah tertentu yang akan dikembangkan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Kawasan Ekonomi Perbatasan adalah Kecamatan Miangas, Nanusa dan Gemeh. Tahapan penyusunan kajian ini sudah dimulai sejak Tahun 2020 melalui Pembentukan Tim Penyusun dan rencananya pada Tahun 2021 akan dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga diharapkan dapat menghasilkan Kajian yang menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pelaksanaan pembangunan. Namun sampai dengan berakhirnya Tahun 2022 Kajian KEP belum bisa dirampungkan karena beberapa kendala teknis selain dari kendala utama yaitu adanya *refocussing* anggaran sehingga membuat penyusunan kajian ini tidak berjalan optimal seperti yang direncanakan sebelumnya. Penjelasan berdasarkan rumus indikator sebagai berikut:

$$\frac{\text{JUMLAH HASIL PENELITIAN YANG DIREKOMENDASIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN}}{\text{TOTAL JUMLAH PENELITIAN}} \times 100$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Ket:

Jumlah Hasil Penelitian yang direkomendasikan dalam pelaksanaan pembangunan = 0

Jumlah Hasil Penelitian = 0

2) Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Capaian persentase indikator ini adalah sebesar 200%. Hasil perhitungan persentase ini didapat dari:

$$\frac{\text{TOTAL JUMLAH YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH}}{\text{2 Perangkat Daerah}} \times 100\% = 200\%$$

$$= \frac{4 \text{ Perangkat Daerah}}{2 \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\% = 200\%$$

Ket:

Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi = 4

Capaian target indikator ini disebabkan Bapelitbang mampu memfasilitasi Perangkat Daerah yang menjadi target walaupun tidak dapat difasilitasi sepenuhnya akibat dari keterbatasan anggaran tapi Bapelitbang melakukan upaya dengan terus mendorong sehingga penyusunan regulasi sebagai dasar hukum dalam penerapan inovasi ini dapat terlaksana. Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah.

**Tabel 3.6**
**Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**

| No | Perangkat Daerah | Inovasi | Regulasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | Public Save Center (PSC) 119 yaitu layanan gawat darurat 1x24 Jam | Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 333 Tahun 2020 tentang Pembentukan Public Save Center 119 Talaud ditetapkan tanggal 17 September 2020 |
| 2 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Laju (Layanan Antar Jemput) | Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 65 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah Layanan Antar Jemput ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Loket Daring TA-LoDa (Tanpa Antrian Loket Daring) yang merupakan aplikasi inovasi percepatan pelayanan | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KepulauanTalaud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Tanpa Antrian Loket Daring Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan tanggal 11 Januari 2021 |
| 4 | Badan Pengelola Perpajakan Dan Retribusi Daerah | SIMPATDA (Sistim Informasi Pendapatan Daerah) | Peraturan Buapti Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online ditetapkan tanggal 03 Juni 2022 |

Capaian persentase indikator ini adalah sebesar 200%. Hasil perhitungan persentase ini didapat dari:

JUMLAH KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN DI DAERAH x 100
JUMLAH KEBIJAKAN INOVASI

= 3 Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan x 100% = 75%
4 Jumlah Kebijakan Inovasi

Ket:
Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan = 3
Jumlah Kebijakan Inovasi = 4
Kebijakan Inovasi yang diterapkan berjumlah 3 OPD, sedangkan 1 OPD yaitu Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung inovasi belum lengkap.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator ini antara lain adalah Bapelitbang berupaya memfasilitasi 4 Kebijakan Inovasi yaitu:

1. Public Service Center (PSC) 119 yaitu layanan gawat darurat 1x24 Jam.
2. Loket Daring TA-LoDa (Tanpa Antrian Loket Daring) yang merupakan aplikasi inovasi percepatan pelayanan.
3. Laju (Layanan Antar Jemput).
4. SIMPATDA (Sistim Informasi Pendapatan Daerah).
   Keempat inovasi tersebut telah ada dalam pelaksanaannya benar-benar telah diterapkan dan berjalan optimal sampai sekarang.

## 6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud masih terbatas baik dari segi kapasitas aparat perencana, dana, peralatan dan perlengkapan kerja serta fasilitas lainnya. Namun dengan keterbatasan yang ada, Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan semaksimal mungkin. Kedepannya diharapkan ada penambahan anggaran untuk program kegiatan prioritas agar pencapaian target indikator dapat dicapai semaksimal mungkin.

Tingkat efisiensi sumber daya adalah selisih penggunaan dengan capaian kinerja yang dicapai. Tingkat efisiensi penggunaan dana untuk mencapai sasaran kinerja yang ingin dicapai Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**
**Tingkat Efisiensi antara Kinerja dan Anggaran Bapelitbang**
**Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran | | | | Tingkat Efisiensi Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Penghematan (Rp) | Capaian (%) | |
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10 =(9/6)*100* |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai Target Kinerja Dengan Baik | 80%-85% | 80,65% | 94,88% | 984.325.200 | 865.763.786 | 118.561.414 | 87,96% | 12,04 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Minimal Baik | 80%-85% | 75% | 88,24% | | | | | |
| | | Rata-Rata Capaian 2 Indikator Kinerja | | | 91,56% | | | | | |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | Peresentase Hasil Penelitian yang Direkomendasikan dalam Pelaksanaan Pembangunan | 65%-70% | 0% | 0,00% | 135.571.500 | 135.543.227 | 28.273 | 99,98% | 0,02 |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | 2 | 4 | 200% | | | | | |
| | | Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah | 55%-60% | 45% | 75% | | | | | |
| | | Rata-Rata Capaian 3 Indikator | | | 91,67% | | | | | |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah, untuk menghasilkan kinerja sebesar 91,56% menggunakan sumber daya keuangan sebesar 87,96% sehingga bisa dikatakan efisien karena capaian kinerja indikator lebih besar dari capaian realisasi anggaran dengan penghematan anggaran sebesar 12,04% dari pagu anggaran. Pada Sasaran 2 Meningkatkan

Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah, untuk menghasilkan kinerja sebesar 91,67% menggunakan sumber daya keuangan sebesar 99,98% pada sasaran indikator ini dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran lebih besar dari pada capaian kinerja indikator sehingga terjadi pemborosan anggaran sebesar 0,02% ini terjadi karena indikator sasaran persentase hasil penelitian yang direkomendasikan dalam pelaksanaan pembangunan tidak menghasilkan capaian kinerja.

## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**Tabel 3.8**
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

| SASARAN STRATEGIS BAPELITBANG | PROGRAM/KEGIATAN | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI MASALAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1 | Program Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 632.633.200 | 524.436.386 | Rasionaliasi anggaran, karena tidak tercapaianya target pendapatan daerah, terutama DAK, Pajak dan Retribusi Daerah | Memaksimalkan SDM untuk melaksanakan kegiatan |
| | | | | | Masih pandemi yang walaupun terbatas | Masih ada kegiatan dilaksanakan secara zoom meeting |
| | 1.1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 581.419.200 | 473.265.766 | Rasionaliasi anggaran, karena tidak tercapaianya target pendapatan daerah, terutama DAK dan Pajak dan Retribusi Daerah | Memaksimalkan anggaran yang tersedia tanpa mengurangi output yang diharapkan |
| | | | | | | Memaksimalkan SDM dalam pendampingan penyusunan dokumen perencanaan |
| | | | | | | Rapat yang dilaksanakan masih secara zoom meeting |
| | 1.2 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 39.922.000 | 39.917.620 | Dukungan anggaran masih kurang memadai | Memanfaatkan aplikasi berbasis Web dalam menerima dan mengirim data |
| | | | | | | Memaksimalkan anggaran yang tersedia tanpa mengurangi output yang diharapkan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3 | Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 11.292.000 | 11.253.000 | Dukungan anggaran masih kurang memadai | Memaksimalkan anggaran yang tersedia tanpa mengurangi output yang diharapkan |
| | 2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 341.327.400 | 341.327.400 | Kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah | Komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan anggaran terhadap kegiatan yag dilaksanakan |
| | | | | | Rendahnya koordinasi antar Perangkat Daerah | Perlunya fasilitas penunjang dalam pekerjaan. |
| | | | | | | Perlunya koordinasi antar Perangkat Daerah |
| | 2.1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia | 149.258.000 | 140.304.900 | Kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah | Komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan anggaran terhadap kegiatan yag dilaksanakan |
| | | | | | Rendahnya koordinasi antar Perangkat Daerah | Perlunya koordinasi antar Perangkat Daerah |
| | 2.2 | Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan | 202.434.000 | 201.022.500 | Minimnya fasilitas penunjang berupa Komputer, Laptop, Printer | Perlunya fasilitas penunjang dalam pekerjaan |
| | | | | | Masih ada dokumen perencanaan yang belum dibuat/disusun | Komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan anggaran terhadap kegiatan yag dilaksanakan |
| Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk Pengembangan Daerah | 3 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 135.571.500 | 49.942.000 | Rasionaliasi anggaran, karena tidak tercapaianya target pendapatan daerah, terutama DAK dan Pajak dan Retribusi Daerah | Memaksimalkan anggaran yang tersedia tanpa mengurangi output yang diharapkan |
| | 3.1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 34.152.000 | 34.152.000 | Belum ada kajian penelitian yang dihasilkan | Penelitian melibatkan Akademisi/Pihak Ketiga |
| | | | | | Anggaran tersedia tidak memadai untuk melakukan kajian penelitian | Komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan anggaran terhadap kegiatan yag dilaksanakan |
| | 3..2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 7.410.000 | 7.410.000 | Ketersediaan data bidang sosial dan kependudukan masih kurang | Memaksimalkan SDM Bidang Penelitian untuk menjemput data ke OPD |
| | 3.3 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 8.380.000 | 8.380.000 | Ketersediaan data Bidang Ekonomi dan Pembangunan masih kurang. | Memaksimalkan SDM Bidang Penelitian untuk menjemput data ke OPD |
| | | | | | Kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan. | Komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan anggaran terhadap kegiatan yag dilaksanakan. |
| | 3.4 | Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 85.629.500 | 85.601.227 | Tidak adanya OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi, karena anggaran hanya untuk perjalanan dinas dalam mendata inovasi yang ada di desa | Melakukan pendataan inovasi daerah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi | |

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

**Tabel 3.9**
**Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022**

| PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI TAHUN 2022 | |
|---|---|---|---|
| | | FISIK<br>KEUANGAN | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.767.809.800** | **3.740.890.748** | **99,29** |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.979.984.426** | **2.960.416.070** | **99,34** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.979.984.426 | 2.960.416.070 | 99,34 |
| **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **17.141.500** | **17.141.500** | **100,00** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.235.000 | 9.235.000 | 100,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.906.500 | 7.906.500 | 100,00 |
| **Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah** | **355.457.294** | **349.710.778** | **98.38** |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.019.000 | 6.019.000 | 100,00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 47.521.000 | 47.451.750 | 99,85 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.580.000 | 33.950.000 | 85,78 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.095.294 | 7.095.200 | 100.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 255.242.000 | 255.194.828 | 99.98 |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **125.961.580** | **125.952.000** | **99,99** |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 125.961.580 | 125.952.000 | 99,99 |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **226.660.000** | **225.507.000** | **99.49** |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46.660.000 | 45.507.000 | 99.49 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 180.000.000 | 180.000.000 | 100,00 |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **62.605.000** | **62.163.400** | **99,29** |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 62.605.000 | 62.163.400 | 99,29 |
| **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **632.633.200** | **524.436.386** | **82,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **581.419.200** | **473.265.766** | **81,40** |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 87.703.000 | 81.748.000 | 93,21 |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota | 468.705.200 | 366.506.766 | 78,20 |
| **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **39.922.000** | **39.917.620** | **99,99** |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembagunan Daerah | 39.922.000 | 39.917.620 | 99,99 |
| **Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **11.292.000** | **11.253.000** | **99,65** |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 11.292.000 | 11.253.000 | 99,65 |
| **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **351.692.000** | **341.327.400** | **97,05** |
| **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia** | **149.258.000** | **140.304.900** | **94,00** |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | 149.258.000 | 140.304.900 | 94,00 |
| **Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan** | **202.434.000** | **201.022.500** | **99,30** |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur | 29.491.000 | 29.491.000 | 100,00 |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 121.078.000 | 119.666.500 | 98,83 |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 48.915.000 | 48.915.000 | 100,00 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 2.950.000 | 2.950.000 | 100,00 |
| **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH** | **135.571.500** | **135.543.227** | **99,98** |
| **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **34.152.000** | **34.152.000** | **100,00** |
| Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 34.152.000 | 34.152.000 | 100,00 |
| **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **7.410.000** | **7.410.000** | **100,00** |
| Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 7.410.000 | 7.410.000 | 100,00 |
| **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **8.380.000** | **8.380.000** | **100,00** |
| Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 8.380.000 | 8.380.000 | 100,00 |
| **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **85.629.500** | **85.601.227** | **99,97** |
| Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | **85.629.500** | **85.601.227** | **99.97** |
| **TOTAL** | **4.887.706.500** | **4.742.197.761** | **97,02** |

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi

kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana strategis berdasarkan DPA Perubahan Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.887.706.500,- sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.4.742.197.761,- atau sebesar 97,02%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 Anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2022 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur.

## 2 Efisiensi Pengganggaran

### 2.1 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

**1). Kinerja Output**

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Menjawab Isu Strategis Daerah | Persentase Keterkaitan dan Keselarasan antara Dokumen RPJMD dan RKPD | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Nasional | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Konsisten antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Dengan Pagu Anggaran | % | 90 | 85 | 94 |
| | | Persentase Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran | % | 80 | 80 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Ketersediaan Database Pembangunan dari Semua Bidang | % | 95 | 86 | 91 |
| | | Persentase Keterkaitan antara Hasil Evaluasi Perencanaan Tahun Sebelumnya Dengan Isu Strategis Tahun Perencanaan | % | 70 | 65 | 93 |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Program** | | | | | | **96,83** |

### 2). Kinerja Keuangan

| No | Program | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 632.633.200 | 524.436.386 | 82,90 |

### 3). Kategori Kinerja Program

| Program | Capaian Kinerja Program | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 96,83 | 82,90 | Efektif-Efisien |

### 2.1.1 Kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Kerja/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Persentase Pokok-Pokok Pikran DPRD yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan | % | 95 | 95 | 100,00 |
| 2. | Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Seluruh Elemen dan Stakeholder dalam | Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Kinerja yang Disampaikan Sudah Sesuai Format | % | 55 | 50 | 90,91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 70 | 65 | 92,86 |
| **Total Capaian Kinerja Kegiatan** | | | | | | **94,59** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 581.419.200 | 473.265.766 | 81,40 |

### 3) Kategori Kinerja Kegiatan

| Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Kineraja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 94,59 | 81,40 | Efektif-Efisien |

## 2.1.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Kerja/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam Penyusunan Database Pembangunan | Persentase Perangkat Daerah Teknis yang Memiilki Database Lengkap | % | 60 | 58 | 96,67 |
| | | Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang Memiliki Database yang Lengkap | % | 90 | 80 | 88,89 |
| **Total Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan** | | | | | | **92,78** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 39.922.000 | 39.917.620 | 99,99 |

### 3) Kategori Kinerja Kegiatan

| Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 92,78 | 99,99 | Boros |

## 2.1.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Kerja/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Monitoring atas Pelaksanaan Pembangunan Daerah | % | 85 | 80 | 94,12 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Evaluasi Terhadap Dokumen Perencanaannya | % | 100 | 100 | 100,00 |
| **Total Capaian Kinerja Kegiatan** | | | | | | **97,06** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 11.292.000 | 11.253.000 | 99,65 |

### 3) Kategori Kinerja

| Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Kineraja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 97,06 | 99,65 | Boros |

## 2.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Semua Bidang | Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD | % | 100 | 75 | 75 |
| | | Persentase Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | % | 85 | 80 | 94 |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Program** | | | | | | **84,56** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Program | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 149.258.000 | 140.304.900 | 94,00 |

### 3) Kategori Kinerja Program

| Program | Capaian Kinerja Program | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 84,56 | 94,00 | Boros |

## 2.2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Kerja/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Wilayah I, II, III | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | % | 80 | 75 | 93,75 |
| | | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | % | 80 | 75 | 93,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | % | 80 | 75 | 93,75 |
| **Total Capaian Kinerja Kegiatan** | | | | | | **93,75** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia | 149.258.000 | 140.304.900 | 94,00 |

### 3) Kategori Kinerja Kegiatan

| Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia | 93,75 | 94,00 | Boros |

## 2.3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Semua Bidang | Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD | % | 100 | 75 | 75 |
| | | Persentase Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD | % | 85 | 82 | 96 |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Program** | | | | | | **85,74** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Program | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 149.258.000 | 140.304.900 | 94,00 |

### 3) Kategori Kinerja Program

| Program | Capaian Kinerja Program | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 85,74 | 94,00 | Boros |

## 2.3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Kerja/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Renstra Perangkat Daerah Berkualitas Baik | % | 80 | 75 | 93,75 |
| | | Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik | % | 85 | 82 | 96,47 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menjabarkan Target Kinerjanya Hingga Jenjang Individu | % | 85 | 82 | 96,47 |
| **Total Capaian Kinerja Kegiatan** | | | | | | **95,56** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan | 149.258.000,00 | 140.304.900,00 | 94,00 |

### 3) Kategori Kinerja

| Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 95,56 | 94,00 | Efektif-Efisien |

## 2.4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Penelitian dan Pengembangan)

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah | Presentase Peningkatan Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Melibatkan Perangkat Daerah, Lembaga Penelitian, Pihak Swasta Dan Elemen Masyarakat | % | 50 | 0 | 0,00 |
| 2 | Terbangunnya Budaya Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah Dengan Kualitas Inovasi Terkait Isu Strategis Pemerintah | % | 60 | 55 | 91,67 |
| | | Peningkatan Jumlah Usulan Inovasi Dari Perangkat Daerah | % | 80 | 30 | 37,50 |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja Program** | | | | | | **43,06** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Program | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 135.571.500,00 | 135.543.227,00 | 99,98 |

### 3) Kategori Kinerja

| Program | Capaian Kinerja Program | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 43,06 | 99,98 | Boros |

## 2.4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, 2. Bidang Sosial dan Kependudukan, 3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan)

### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Kerja/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan | Persentase Perangkat Daerah yang Terlibat dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan | % | 6 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintahan | Jumlah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (akademisi), Pihak Swasta dan Elemen Masyarakat yang Bekerjasama dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan | Jumlah | 2 | 0 | 0,00 |
| 2 | Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan Dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan | Persentase Perangkat Daerah yang Terlibat dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan | % | 6 | 0 | 0,00 |
| | | Jumlah Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi (akademisi), Pihak Swasta dan Elemen Masyarakat yang bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pemerintahan | Jumlah | 2 | 0 | 0,00 |
| **Total Capaian Kinerja Kegiatan** | | | | | | **0,00** |

### 2) Kinerja Keuangan

| No | Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 34.152.000,00 | 34.152.000,00 | 100,00 |
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 | 100,00 |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 8.380.000,00 | 8.380.000,00 | 100,00 |

### 3) Kategori Kinerja

| Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 0,00 | 100,00 | Boros |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 0,00 | 100,00 | Boros |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 0,00 | 100,00 | Boros |

### 2.4.2 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

#### 1) Kinerja Output

| No | Sasaran Kerja/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Minat Seluruh Perangkat Daerah Dalam Menciptakan Inovasi Yang Mampu Menjawab Isu Strategis Urusannya | Persentase Perangkat Paritisipasi Perangkat Daerah Dalam Membuat Inovasi Daerah | % | 9 | 9 | 100,00 |
| **Total Capaian Kinerja Kegiatan** | | | | | | **100,00** |

#### 2) Kinerja Keuangan

| No | Nama Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 85.629.500,00 | 85.601.227,00 | 99,97 |

#### 3) Kategori Kinerja

| Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Kinerja Keuangan | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 100,00 | 99,97 | Efektif-Efisien |

## C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan pada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, bertujuan untuk memperoleh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manjemen kinerja, yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;

4. Evaluasi Kinerja;
5. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKj.IP) Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Berdasarkan hasil evaluasi, Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh nilai sebesar 91,62% dengan kategori (sangat memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022.

Rekomendasi yang diberikan kepada Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud serta seluruh jajarannya yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra, PK, Laporan Kinerja dan IKU untuk dipublikasikan dalam website;
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
3. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara umum, capaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 94,65% dengan kategori (sangat memuaskan). Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Dari 5 indikator tersebut 3 indikator mencapai target secara maksimal yaitu:

- Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ada 2 indikator kinerja yaitu
  a) Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerjanya dengan baik sebesar 98,82%.
  b) Persentase Perangkat Daerah yang capaian SAKIP pada komponen perencanaan kinerja minimal baik 99,41%.
- Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi untuk pengembangan daerah Daerah ada 2 indikator kinerja yaitu
  a) Persentase hasil penelitian yang direkomendasikan dalam pelaksanaan pembangunan 0 persen untuk untuk target Tahun kedua.
  b) Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapam inovasi daerah 200% untuk target Tahun kedua dan
  c) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 75% untuk target Tahun kedua.

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dikategorikan Berdasarkan hasil evaluasi, Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh nilai sebesar 94,65% dengan kategori (sangat memuaskan)

mencapai sasaran Indikator Straegis Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2025.

Hasil evaluasi Kebijakan Program Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka mempercepat pencapaian visi dan misi Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025.

**B. Saran**

Untuk mengatasi hambatan/kendala yang mungkin dihadapi dalam pencapaian target indikator sasaran pada tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip prinsip good governance menerapkan Strategi Kebijakan, Bapelitbang sebagai titik central perencanaan yang berkelanjutan;
2. Fasilitasi dalam penyusunan Kajian Penelitian serta Kebijakan Inovasi Daerah untuk pengembangan daerah harus lebih dioptimalkan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan harus dioptimalkan untuk mengetahui perkembangan dari setiap program/kegiatan sehingga hambatan/kendala yang mungkin dihadapi dapat diantisipasi lebih cepat untuk mendapatkan solusi yang tepat;
4. Perlunya dukungan dana yang memadai terutama untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapelitbang.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan pembangunan program kegiatan Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud ke depan akan lebih terarah, terpadu berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu kebersamaan peran dan partisipasi aktif dari segenap unsur Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaul Tahun 2022 dibuat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program/kegiatan yang sudah terlaksana guna peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Melonguane, Januari 2023

Kepala Bapelitbang
Kabupaten Kepulauan Talaud

**SPEN T. BAWANGUN, ST., MT**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730707 200003 1 005